

SKRIPSI
ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
(Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Majene)

Analysis Of The Presentation Of Financial Reports In
Public Sector Organizations
(Case Study Of Regional Financial and Asset Agencies Majene Regency)



KARMILA

C02 20 361

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE

2025

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

(Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Majene)



KARMILA

C02 20 361

**Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat
Telah Disetujui Oleh**

Pembimbing I



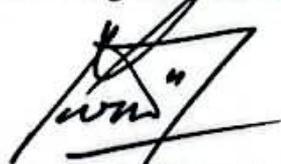
**Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak
NIP:19930820 201903 1 016**

Pembimbing II



**Hisyam Ichsan, SE., M.Si
NIP:19940629 202203 2 010**

**Menyetujui,
Koordinator Program Studi Akuntansi**



**Nuraeni M. S.Pd., M.Ak
NIP:19831203 201903 2 006**

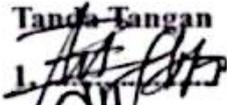
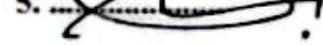
**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
(Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majene)**

Dipersiapkan dan disetujui oleh:

**KARMILA
C02 20 361**

Telah diuji dan diterima Panitia Ujian
Pada Tanggal 8 Mei 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

| Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|--|----------------|--|
| 1. Taufik Hidayat B, Tahawa, SE., M.Ak | Ketua | 1.  |
| 2. Hisyam Ichsan, SE., M.Si | Sekretaris | 2.  |
| 3. Jumardi, SE., M.Si | Anggota | 3.  |
| 4. Sufyan Amirullah, SE., M.Ak | Anggota | 4.  |
| 5. Indra Basir, SE., M.Ak | Anggota | 5.  |

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I


Taufik Hidayat B, Tahawa, SE., M.Ak
NIP:19930820 201903 1 016

Pembimbing II


Hisyam Ichsan, SE., M.Si
NIP:19949629 202203 2 010

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi


Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP:19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karmila
Nim : C0220361
Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene)**" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, November 2024

Yang Membuat Pernyataan


KARMILA
C0220361

ABSTRAK

KARMILA, Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene), dibimbing oleh Taufik Hidayat B, Tahawa, SE., M.Ak dan Hisyam Ichsan, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan pada organisasi sektor publik di pemerintah kabupaten majene. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di lakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene. Narasumber dalam penelitian ini yakni: Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene sudah mengacu pada Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) Tentang Penyajian Laporan Keuangan, dimana komponen laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai serta unsur yang disajikan dalam setiap komponen laporan keuangan sudah sesuai dengan yang di tetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan

ABSTRAC

KARMILA, *Analysis of Financial Report Presentation in public sector organizations (case study at BKAD Majene Regency), supervised by Taufik Hidayat B, Tahawa, SE., M.Ak and Hisyam Ichsan, SE., M.Si*

This study aims to determine how financial reports are presented in public sector organizations in the Majene district government. The type of research used is Qualitative research. Data collection techniques are by conducting observations, interviews and documentation. The location of the research was conducted at the Regional Finance and Asset Agency of Majene Regency. The sources in this study were: Head of Accounting and Reporting Division. The data analysis used was data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Preparation of Financial Reports at the Regional Finance and Asset Agency of Majene Regency has referred to the Government Accounting Standards (SAP) Concerning the Presentation of Financial Reports, where the components of the financial reports presented are appropriate and the elements presented in each component of the financial report are in accordance with those stipulated in Government Regulation Number 71 of 2010 Concerning the Presentation of Financial Reports.

Keywords: *Financial Reports, Presentation of Financial Reports*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga atau organisasi sektor publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Organisasi sektor publik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai penyedia layanan publik, organisasi sektor publik bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan sumber daya secara efektif dan transparan. Laporan keuangan menjadi salah satu sarana pertanggungjawaban organisasi sektor publik kepada pemangku kepentingan. Akuntansi sektor publik ini terus berkembang sebagai sebuah alat pengawasan dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas publik dan transparansi publik terkait dengan penggunaan dana masyarakat didalamnya (Nordiawan dan Ayuningtyas, 2014).

Menurut (Mulyana, 2016) Transparansi keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin meningkat dan mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah berkewajiban menyajikan informasi melalui laporan keuangan secara transparan dan akuntabilitas untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2016).

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan organisasi, termasuk organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan yang baik akan mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Penyajian laporan keuangan pada organisasi sektor publik di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Melalui SAP, diharapkan laporan keuangan dapat disajikan secara wajar, dapat dipahami, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait penyajian laporan keuangan pada organisasi sektor publik.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu pada *stakeholder* tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* yaitu pemangku kepentingan internal yang terdiri dari para pegawai dan eksternal yang terdiri dari dewan perwakilan rakyat, para pembayar pajak, masyarakat dan LSM (Arifin, 2016). Oleh karena itu, laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu cara untuk mengelolah kepercayaan para pemangku kepentingan, dimana keberadaan para pemangku kepentingan akan

sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi manajemen terhadap urgensi praktik akuntansi entitas.

Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Sulawesi Barat yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja demi terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu organisasi sektor publik yang menarik untuk diteliti adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Majene. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Majene memiliki peran penting dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel.

Berdasarkan fenomena yang terjadi ada beberapa kabupaten yang belum sepenuhnya mengimplementasikan terkait dengan standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah, salah satunya dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Sofiyul Fu'ad dan Yudhanta Sambharkreshna (2024) di pemerintah daerah kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini memberikan jawaban bahwasannya laporan keuangan daerah kabupaten nganjuk belum sepenuhnya mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Ada beberapa ketidaksesuaian seperti yang ditunjukkan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene terdapat fenomena pada penyajian laporan keuangan yaitu adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan dan

penyampaian laporan keuangan berdasarkan SAP pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene, dan belum optimal dalam penyampaian laporan keuangan itu sendiri.

Berdasarkan fenomena yang di hadapi di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah apa yang menjadi upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga peneliti mengangkat judul **“Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyajian laporan keuangan pada organisasi sektor publik di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan pada organisasi sektor publik di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, peneliti bermaksud untuk mencapai mamfaat sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi, sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan terkait penyajian laporan keuangan terhadap organisasi sektor publik.

2. Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi jika hendak melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Bagi peneliti, sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terhadap penyajian laporan keuangan terhadap organisasi sektor publik.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Bagi pemerintah daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholders*

Penerapan teori *stakeholders* dalam organisasi/entitas sektor publik adalah sebagai salah satu tolak ukur apakah organisasi sektor publik sudah mampu menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan *stakeholders*. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah apakah suatu pemerintahan sudah mampu untuk menyajikan laporan keuangan yang berisi informasi yang berkualitas guna diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh *stakeholders*. Pelaporan keuangan pemerintah yang baik adalah laporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholders*. Salah satu cara untuk memenuhi keinginan pemangku kepentingan adalah dengan melakukan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengelola kepercayaan para pemangku kepentingan, dimana keberadaan pemangku kepentingan akan sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi manajemen terhadap urgensi praktik akuntansi entitas. Pemangku kepentingan dan organisasi saling mempengaruhi dari hubungan sosial dalam bentuk responsibilitas dan akuntabilitas yang diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang handal, relevan, tepat waktu, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan (Arifin dkk, 2016).

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Mardiasmo, 2018) akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Menurut (Sujarweni, 2015) akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu entitas atau organisasi publik yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya.

Menurut (Halim dan Kusufi, 2014) akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan aktivitas atau perlakuan akuntansi pada

domain publik yang terdiri atas proses pencatatan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

2.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Peranan organisasi sektor publik seperti pemerintah dan usaha-usaha yang dilakukannya telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara. Pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik pada pemerintahan akan menimbulkan kekosongan pengaturan praktik akuntansi di sektor publik itu sendiri. Sebagai langkah awal, penataan kembali akuntansi sektor publik tentunya harus dilakukan. Salah satu hal yang sangat substansial adalah konsensus akan ruang lingkup akuntansi sektor publik.

Menurut (Sujarweni, 2015) Lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai perkembangan pemikiran yang terjadi diatas. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi publik nirlaba lainnya. Berikut adalah beberapa Akuntansi Sektor Publik di Indonesia:

1. Akuntansi Pemerintah Pusat.
2. Akuntansi Pemerintah Daerah.
3. Akuntansi Desa.
4. Akuntansi Tempat Beribadah (Masjid, Gereja, Pura, Wihara).
5. Akuntansi LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).

6. Akuntansi Yayasan.
7. Akuntansi Pendidikan (Sekolah dan Perguruan Tinggi) serta,
8. Akuntansi Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit).
9. Tujuan Akuntansi Sektor Publik.

2.1.4 Tujuan Akuntansi Pada Sektor Publik

Tujuan akuntansi sektor publik oleh American Accounting Association (AAA) dalam (Sujarweni, 2015) yakni:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*manajemen control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

2.1.5 Penyajian Laporan Keuangan Sektor Publik

Penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.1 bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*). Penyajian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan secara baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Secara umum, laporan keuangan dibuat agar dapat dipergunakan oleh bagian keuangan untuk

memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan. Oleh karena itulah, laporan keuangan juga dapat dikatakan mempunyai peranan prediktif dan prospektif.

2.1.6 Peran dan Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan dan perundang-undangan (Elsye R dkk, 2014).

Menurut Permendagri No.64 Tahun 2013 tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara garis besar tujuan laporan keuangan sektor publik (Mahmudi, 2016):

1. Memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan yang digunakan untuk pertimbangan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
2. Menunjukkan transparansi dan akuntabilitas publik.

3. Memberi informasi untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Menurut (Elsye R dkk, 2014) mengemukakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan hal sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.7 Manfaat Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut (Mahmudi, 2016) banyak pihak yang masih berpandangan bahwa penyajian laporan keuangan hanya merupakan formalitas dalam rangka memenuhi ketentuan perundangan saja. Laporan keuangan yang dipublikasikan belum benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, bahkan seringkali keputusan yang dilakukan lebih banyak didasari oleh keputusan politis semata. Kurang dimanfaatkannya laporan keuangan itu karena masih rendahnya budaya akuntabilitas dan budaya membuat laporan keuangan. Penyebab lainnya adalah masih adanya masyarakat yang kurang rasional atau cenderung emosional dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan, yaitu:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang diisyaratkan.
4. Memberi informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:

- a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kriteria periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain.
- b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintahan.
- c. Untuk mengevaluasi hasil (*outcome*) suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
- d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (*equity & equality*).

2.1.8 Komponen Laporan Pemerintah Daerah

Menurut (Elsye R dkk, 2014) Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK).

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus, defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Informasi yang terdapat dalam LRA berguna bagi para

pengguna laporan dengan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri atas saldo anggaran lebih, dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain.

a. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dan pada tanggal tertentu.

b. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Arus Kas (*Cash Flow*)

Laporan arus kas menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.9 Pengguna Laporan Keuangan Sektor Publik

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengguna utama laporan keuangan pemerintah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masyarakat.
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
4. Pemerintah.

2.1.10 Karakteristik Penyajian Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut (Yuliana, 2017), indikator penyajian laporan keuangan meliputi:

1. Relevan

Informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan telah disajikan dengan jujur, apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh, dan informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan tidak berpihak kepada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas dan pemahaman para pengguna.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu dengan topik yang berkaitan dengan judul peneliti.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti (Tahun) | Judul | Metode Penelitian | | Hasil penelitian |
|----|---|---|---|--|--|
| | | | Persamaan | Perbedaan | |
| 1. | Poppy Indrihastuti dan Hendrik Suhendr (2023) | Analisis Penyajian Laporan Keuangan Di Kantor Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang | Membahas tentang Analisis Penyajian laporan keuangan | Penelitian dilakukan di Kantor Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang | Hasil penelitian menunjukkan bahwa stimulan laporan keuangan yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Buku Kas Umum, Buku Pajak, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Kantor Desa Kalisongo sangat berhasil. |
| 2. | Mitan dan Wilhelmin (2022) | Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap). | Membahas tentang Analisis penyajian laporan keuangan. | Objek Penelitian yaitu Badan Usaha Milik Desa Watu Jong. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Watu Jong terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan operasional yang disusun oleh Badan Usaha Milik |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| | | | | | Desa Watu Jong penyajiannya belum berdasarkan SAK ETAP, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Watu Jong secara umum belum menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum yaitu SAK ETAP. |
| 3. | Sofiyul Fu'ad dan Yudhanta Sambharakr eshna (2024) | Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Penerapan Pp No. 71 Tahun 2010 | Membahas tentang penyajian laporan keuangan | Objek penelitian yaitu pemerintah daerah kabupaten Nganjuk | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya laporan keuangan daerah kabupaten nganjuk belum sepenuhnya mengimplementasikan PP No. 71 tahun 2010. Ada beberapa ketidaksesuaian seperti yang ditunjukkan dalam laporan keuangan. |
| 4. | Zulkifli Z (2019) | Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru | Membahas tentang Penyajian Laporan Keuangan | Objek penelitian adalah Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan BMT Al-Ittihad belum sepenuhnya mengadopsi PSAK No.101, |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|--|---|---|
| | | | | | <p>karena: 1) tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan zakat, 2) tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana amal, 3) tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan, 4) tidak menyajikan informasi mengenai penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, serta tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK No. 101.</p> |
| 5. | Bustamam (2015) | Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh | Membahas tentang analisis penyajian laporan keuangan | Objek penelitian yaitu Baitul Mal Provinsi Aceh | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Baitul Mal Aceh telah mengadaptasi PSAK 109. Laporan keuangan pada Baitul Mal telah menganut PSAK 109 yang terdiri dari posisi keuangan konsolidasi,</p> |

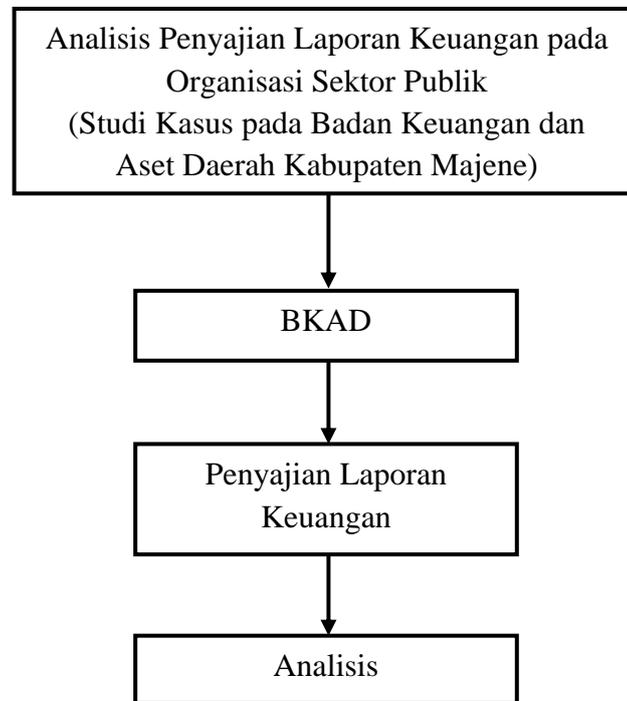
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. |
|--|--|--|--|--|--|

2.3 Kerangka Konseptual

Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada Organisasi Sektor Publik merupakan topik utama atau fokus penelitian, untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan disusun, disajikan dan di analisis dalam konteks organisasi publik. Badan Keuangan dan Aset Daerah digunakan sebagai objek dari studi kasus ini, lembaga yang bertugas mengelolah keuangan dan aset pemerintah daerah, Penelitian ini dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan merupakan kegiatan utama yang menjadi titik analisis mengenai laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Tahap akhir dalam kerangka ini adalah menganalisis hasil penyajian laporan keuangan yang dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Majene, analisis penyajian laporan keuangan melibatkan aspek kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaporan, atau kualitas informasi keuangan yang di hasilkan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dibuat sebuah gambar mengenai paradigma dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene bahwa Penyajian Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan komponen laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan unsure yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan sudah sesuai dengan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Setelah menganalisis data dari Laporan Keuangan serta keterangan yang di peroleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene, Laporan Keuangan telah disajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan yang layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

5.2 Saran

Penelitian dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan berupa saran mengenai beberapa hal sebagai berikut :

1. Penelitian lebih lanjut disarankan menggunakan variabel yang berpengaruh lainnya terhadap penyajian laporan keuangan.
2. Laporan Keuangan berikutnya Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene di harapkan terus melakukan pencatatan Laporan

Keuangan yang Terkomputerisasi dan mengikuti kaidakaid Laporan Keuangan yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Arifin. 2016. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada kelompok lanjut usia di wilayah kerja upt puskesmas petangi kabupaten Bandung tahun 2016. *EJournal Medika*, 5(7).
- Elsye R., Dadang dan Umuh. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akruar Pemerintahan Daerah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Faridah. Umi (2015). *Manajemen Sumber Daya manusia 1*. Ponorogo : UNMUH
- Fu'ad, S., & Sambharakreshna, Y. (2024). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Penerapan Pp No. 71 Tahun 2010. *Among Makarti*, 17(1), 17-30.
- Hairuddin, (2023). *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Statistika*.
- Ghozali dan Chariri, (2016). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Undip: Semarang
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Teori, Komsep, Aplikasi akuntansi Sektor Pubik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta : Salemba Empat
- Indrihastuti, P., Suhendri, H., & Paila, M. I. W. (2023). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Di Kantor Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 11(2), 197-207.
- Mahajan, R., Lim, W. M., Sareen, M., Kumar, S., & Panwar, R. (2023). Stakeholder theory. *Journal of Business Research*, 166, 114104.
- Mahmudi. (2016) *Akuntansi Sektor Publik (edisi revisi)*. Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik(edisi terbaru)*. Yogyakarta : Andi.
- Mitan, W., Lamawitak, P. L., & Sumiyati, M. F. (2022). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). *Jurnal Accounting UNIPA*, 1(2), 28-38.
- Mulyana, B. (2016). *Pengaruh penyajian neraca daerah dan aksebilas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.

- Nordiawan D, Ayuningtyas H, (2014), Akuntansi Sektor Publik, (Jakarta: Salemba 4), Hal. 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 “*Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*”. Jakarta : Legalitas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 “*Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*”. Jakarta : Legalitas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 “*Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*”. Jakarta : Legalitas.
- Shadrina, H. N., & Hidajat, S. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 459-466.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian. Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Susilawati, M., Malikhah, A., & Mawardi, M. C. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Kota Malang dan Kabupaten Malang). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(05).
- Yuliana, Erlita (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Zulkifli, Z., Bakhri, B. S., & Rahmawati, R. (2019). Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 16(1), 1–22.